

Analisis Perubahan APBDes Tahun 2020 dan 2021 di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Fi'la Al Farisi¹, Ramadhan Pancasilawan²

¹Program Studi Administrasi Keuangan Publik, ²Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
fila20001@mail.unpad.ac.id, ramadhan.pancasilawan@unpad.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research is to identify the aspects that underwent changes in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for the years 2020 and 2021 in the Sayang Village, Jatinangor Subdistrict, Sumedang Regency. This is particularly important due to the impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia during those years, which is expected to influence changes in the APBDes. The research methodology employed is qualitative descriptive method, with field study as the data collection technique. The results obtained from the analysis of changes in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) for the fiscal years 2020 and 2021 indicate alterations in both revenue and expenditure budgets, including both increases and decreases. This is attributed to the onset of the COVID-19 pandemic in 2020, with the budget being directed towards disaster response, emergency, and urgent areas. In 2021, there is a positive phenomenon in budget changes, with the majority experiencing increases focused on improving healthcare services. Similar to the fiscal year 2020, there were no changes in financing for the fiscal year 2021.

Keywords: APBDes; Changes; Covid-19

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi aspek apa saja yang mengalami perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan 2021 pada Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang karena pada tahun tersebut terdapat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia yang akan berdampak pada perubahan APBDes. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif sebagai kerangka penelitian, dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan. Hasil yang ditemukan dari analisis perubahan APBDes tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah terjadinya perubahan anggaran pada Pendapatan dan Belanja baik perubahan kenaikan maupun perubahan penurunan anggaran. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 awal mula terjadinya Pandemi COVID-19 dan anggaran difokuskan kepada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak. Pada tahun 2021 memiliki fenomena yang baik pada perubahan anggaran yang mana mayoritas mengalami perubahan kenaikan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan. Sama halnya seperti tahun anggaran 2020, pembiayaan pada tahun anggaran 2021 tidak mengalami sama sekali perubahan.

Kata kunci: APBDes; Perubahan; COVID-19

PENDAHULUAN

Desa merupakan elemen terkecil dalam struktur administrasi pemerintahan. Di Indonesia, terdapat sedikitnya 74.754 desa yang dihuni oleh lebih dari separuh jumlah penduduk negara. Desa-desa ini ditandai oleh keseragaman dalam jenis pekerjaan penduduknya, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya (Asoka, 2018). Otonomi Desa menjadi suatu hal yang perlu dipahami karena desa sebagai pemegang kekuasaan/wewenang dalam hal mengurus dan mengatur yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah daerah harus memperhitungkan berbagai aspek yang ada pada pemerintah desa terutama mengenai pembiayaan dan penganggaran (Seran, 2021).

Desa memiliki peran yang cukup penting sebagai penyedia layanan infrastruktur pedesaan serta dalam menurunkan angka kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan masyarakat (Faradhiba & Diana, 2018). Apabila berbicara mengenai keuangan desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan LPJ wajib disusun oleh pemerintah desa. Laporan yang disusun ini nantinya berisikan kegiatan atau suatu siklus yang biasanya dijalankan selama periode berjalan yang dimulai dari, menganggarkan, melaksanakan, menata usahakan, dan di akhir adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan (Suchayo, 2019).

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan yang ada di desa memiliki tujuan untuk terciptanya desa yang dapat berkembang dan peduli terhadap rakyatnya, yang mana pada akhirnya akan dibarengi dengan sistem pengelolaan yang adil dan makmur bagi masyarakatnya. Dana Desa adalah dana dengan sumber dari APBN dan dikelola oleh pemerintah desa yang bertugas dalam pengelolaan keuangan di desa. Semua pendanaan yang diberikan ke desa akan tercantum pada APBDes sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sehubungan dengan adanya kebijakan yang mengatur, maka pemerintah desa tidak dapat mengelola keuangan desa (anggaran desa) seenaknya meskipun kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penggunaan anggaran (Basril, Marianti, & Rofika, 2021)

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 20 menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dikenal dengan istilah APBDes. APBDes yaitu kegiatan pemerintah desa mengenai rencana keuangan tahunan. Proses APBDes melibatkan beberapa tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (Somantri & Nanda, 2019). Selain hal itu, APBDes secara esensial adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan desa selama satu tahun anggaran. Rencana ini dirampungkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sesuai dengan peraturan desa dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Bupati. (Walean, Mantiri, & Pati, 2021)

Desa-desa yang ada di Indonesia mengalami tantangannya sendiri ketika adanya Covid-19 karena selain berdampak pada lingkup kesehatan, pandemi ini berdampak terhadap kondisi ekonomi. Dengan demikian, penanganan yang serius perlu dilakukan dan selaras antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons pandemi melalui keberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 mengenai Penyesuaian Fokus Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa (Ikhwanto, Suhaedi, & Rakhmawati, 2022). Pada saat pandemi ini, dana desa bertujuan sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi yang sesuai dengan prioritas nasional. Dana desa pada masa pandemi (2020) digunakan dalam menunjang 21 prioritas, salah satunya ialah digunakan untuk pencegahan, penanganan, dan kegiatan respons darurat terhadap bencana alam maupun non-alam. (Covid-19) (Dharmakarja, Kusuma, Azizah, & Kesuma, 2022)

Pada tahun anggaran 2020 dan 2021, terjadi perubahan APBDes pada pemerintah Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang diakibatkan oleh adanya bencana non-alam (Pandemi). Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang didapatkan adalah “Apa saja komponen yang mengalami perubahan pada APBDes Desa Sayang pada tahun 2020 dan 2021?”. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen pada APBDes yang mengalami perubahan pada tahun 2020 dan 2021.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini membahas pentingnya untuk mempelajari objek dan kondisi alam, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengolahnya tanpa melakukan simbolisasi atau kuantifikasi (Sugiyono, 2020). Data dari penelitian kualitatif adalah informasi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, ungkapan, cerita, dan gambar. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memvisualisasikan suatu hasil dari sebuah penelitian. Pendekatan deskriptif juga bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi tentang kejadian yang sedang diteliti.

Jenis data yang diterapkan pada penulisan ini adalah data primer berupa dokumen perubahan APBDes Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada tahun 2020 dan 2021. Dalam prosesnya, peneliti menerapkan *purposive sampling*, suatu metode pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan khusus (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada saat melaksanakan kegiatan magang pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perubahan APBDes Pemerintah Desa Sayang Tahun Anggaran 2020

KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBA H/ (BERKURAN G)	KETERANG AN
		SEMULA	MENJADI		
4	PENDAPAT AN				
4.1	PAD	36.500.000	36.500.000	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.648.520.00	1.532.410.00	(116.110.00 0)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.350.260	2.350.260	
	JUMLAH PENDAPAT AN	1.685.020.0 00	1.571.260.2 60	(113.759.74 0)	
5	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	452.325.612	454.675.872	2.350.250	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	570.029.600	430.003.000	(140.026.60 0)	
5.3	Belanja Modal	781.228.900	393.262.700	(387.966.20 0)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	0,00	411.882.800	411.882.800	
	JUMLAH BELANJA	1.803.584.1 12	1.689.824.3 72	(113.759.74 0)	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(118.564.11 2)	(118.564.11 2)	0,00	
6	PEMBIAYA AN				
6.1	Penerimaan	168.564.11 2	168.563.11 2	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	168.564.112	168.563.112	0,00	
6.2	Pengeluaran	50.000.000	50.000.000	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	50.000.000	0,00	

	PEMBIAYAAN NETC	118.564.112	118.564.112	0,00	
--	------------------------	-------------	-------------	------	--

Sumber: Dokumen Perubahan APBDes Pemerintah Desa Sayang Tahun 2020

Dari informasi yang diperoleh tentang perubahan APBDes Desa Sayang pada tahun 2020, terlihat adanya perubahan pada Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-Lain, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Tidak Terduga. Apabila dirinci lebih dalam lagi keenam elemen di atas memiliki sub bagian yang mengalami perubahan, diantaranya dari Pendapatan Transfer, Dana Desa mengalami perubahan dari semula 768.991.000 menjadi 758.184.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengalami perubahan dari semula 277.419.000 menjadi 211.542.000, dan Alokasi Dana Desa mengalami perubahan dari semula 472.110.000 menjadi 432.684.000. Pendapatan Lain-lain mengalami perubahan dari sub bunga bank yang semula 0,00 menjadi 2.350.260.

Apabila dari segi belanja, seluruhnya mengalami perubahan. Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dari semula 643.559.712 menjadi 638.349.972 yang mayoritas pada penyedia penghasilan, jaminan sosial, operasional, dan penyedia sarana prasarana. Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalami perubahan dari semula 993.642.000 menjadi 570.953.200 yang terdiri dari sub bidang yang berada di dalamnya. Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan mengalami perubahan dari semula 164.882.400 menjadi 68.639.400 yang terdiri dari berbagai sub bidang yang berada di dalamnya. Pada bidang pemberdayaan masyarakat mengalami perubahan dari semula 1.500.000 menjadi 0,00. Pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa mengalami perubahan dari semula 0,00 menjadi 411.882.800.

Dari segi pembiayaan, APBDes Desa Sayang tidak ada yang berubah sama sekali. Apabila dilihat dari keseluruhan perubahan yang terjadi pada APBDes terjadi penurunan pada pendapatan dan belanja terkecuali bidang yang menangani penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak karena pada tahun 2020 pertama kalinya terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tabel 2. Perubahan APBDes Pemerintah Desa Sayang Tahun Anggaran 2021

KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
4	PENDAPATAN				
4.1	PAD	36.500.000	36.500.000	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.532.410.000	1.666.856.000	134.446.000	

4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	8.500.000	8.500.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.568.910.000	1.711.856.000	142.946.000	
5	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	473.363.892	515.976.692	42.612.800	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	348.595.550	500.407.050	151.811.500	
5.3	Belanja Modal	168.300.100	197.468.100	29.168.000	
5.4	Belanja Tidak Terduga	530.646.300	450.000.000	(80.646.300)	
	JUMLAH BELANJA	1.520.905.842	1.663.852.843	142.946.000	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	48.004.158	48.004.158	0,00	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan	1.995.842	1.995.842	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	1.995.842	1.995.842	0,00	
6.2	Pengeluaran	50.000.000	50.000.000	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	50.000.000	0,00	
	PEMBIAYAAN NETC	(48.004.158)	(48.004.158)	0,00	

Sumber: Dokumen APBDes Pemerintah Desa Sayang Tahun 2021

Berdasarkan data Perubahan APBDes Pemerintah Desa Sayang Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan pada Pendapatan dan Belanja. Pada pendapatan, pendapatan transfer mengalami perubahan yang semula 1.532.410.000 menjadi 1.666.856.000 hal ini ditunjang dengan naiknya anggaran yang dimiliki oleh Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa. Pada pendapatan lain-lain mengalami perubahan yang semula 0,00 menjadi 8.500.000 yang disebabkan oleh adanya perubahan kenaikan pada Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Apabila dari segi belanja, secara keseluruhan belanja mengalami kenaikan yang didukung dengan perubahan kenaikan anggaran pada belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Tetapi pada belanja tidak terduga mengalami perubahan penurunan anggaran. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami perubahan yang semula 745.363.842 menjadi 764.576.842 yang diantaranya terjadi perubahan peningkatan untuk penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan, dan operasional serta penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terjadi perubahan yang semula 201.287.700 menjadi 361.240.000 yang diantaranya terjadi perubahan pada sub bidang kesehatan 79.100.000 menjadi 152.531.200, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami perubahan penurunan anggaran yang semula 14.133.000 menjadi 0,00. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan terjadi perubahan yang semula 43.608.000 menjadi 88.033.000.

Sama halnya seperti tahun anggaran 2020, pembiayaan pada tahun anggaran 2021 tidak mengalami sama sekali perubahan dan apabila dilihat secara keseluruhan tahun anggaran 2021 memiliki *trend* yang baik pada perubahan anggaran yang mana mayoritas mengalami perubahan kenaikan. Hal ini juga disebabkan oleh pendapatan yang naik dan belanja pada sub bidang kesehatan mengalami kenaikan karena pada tahun 2021 dianggarkan untuk keperluan peralatan medis penunjang kebutuhan penurunan pencegahan COVID-19 seperti obat-obatan dan vaksin.

KESIMPULAN DAN SARAN

APBDes merupakan bentuk kewenangan sekaligus pertanggungjawaban pemegang otoritas pemerintah Desa dalam hal ini pemerintah Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor dalam upaya merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang telah disusun kepada masyarakat desa. Melihat pada perubahan APBDes 2020 dan 2021 yang terjadi pada pemerintahan Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, secara keseluruhan terjadi perubahan pada pendapatan dan belanja baik kenaikan maupun penurunan anggaran. Apabila dilihat dari perubahan APBDes pada tahun anggaran 2020 terjadi penurunan pada pendapatan dan belanja terkecuali pada belanja, bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak karena pada tahun 2020 pertama kalinya terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Apabila dilihat dari perubahan APBDes pada tahun anggaran 2021 sama halnya seperti tahun anggaran 2020, pembiayaan pada tahun anggaran 2021 tidak mengalami sama sekali perubahan dan apabila dilihat secara keseluruhan tahun anggaran 2021 memiliki *trend* yang baik pada perubahan anggaran yang mana mayoritas mengalami perubahan kenaikan baik itu pendapatan maupun belanja. Namun berbeda dengan tahun anggaran 2020, pada tahun 2021 belanja tidak terduga mengalami perubahan pengurangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Asoka, R. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JEMASI*, 1-17.

- Basril, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 1-17.
- Dharmakarja, I. M., Kusuma, I. K., Azizah, S. N., & Kesuma, W. K. (2022). Analisis Proses Perubahan APBDesa dalam Rangka Prioritas Penggunaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. *AKUNTANSIKU*, 1-16.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *E-JRA*, 1-15.
- Ikhwanto, Y., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2022). Refocussing dan Realokasi Anggaran Desa dalam Menangani Pandemi Covid 19 di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risma*, 1-9.
- Seran, F. (2021). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Penelitian Di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka). *Jurnal Poros Politik*, 1-7.
- Somantri, Y. F., & Nanda, U. L. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya. *EkoPreneur*, 1-7.
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1-14.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1-9.